

### **“SKP dan FI melayangkan surat ke PBB”**

**Jenewa, 25 April 2004.** Setelah melakukan advokasi mengenai kasus Abepura bersama dengan Tim Koalisi selama tiga tahun, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan mitra kerjanya, *Franciscans International*, LSM Internasional yang bermarkas di Jenewa, Swis, telah melayangkan surat kepada Leandro Despouy, Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara. Dalam surat tertanggal April 2004, kedua lembaga meminta agar *pertama*, beliau mendesak Pemerintah Indonesia agar menjamin supaya persidangan berjalan dengan adil, tidak memihak, dan memenuhi kriteria pengadilan HAM internasional; *kedua*, memantau dari dekat jalannya persidangan; dan *ketiga*, melaporkan segala perkembangan kepada Prosedur Khusus PBB yang terkait.

LSM-LSM internasional, seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, yang terus memantau kasus ini sejak awal tidak ketinggalan langkah. Dalam pernyataan pers *Amnesty International*, 7 Mei 2004, LSM Internasional yang berbasis di London, Inggris, ini mendesak Pemerintah Indonesia supaya menjamin terselenggaranya pengadilan HAM yang adil, jujur, dan memenuhi standar pengadilan HAM internasional.

Pada tahun 2003, dua Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan dan mengenai Pembunuhan Kilat telah menyampaikan kasus ini ke hadapan Sidang ke-59 Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Namun demikian, baru tahun ini Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia di Makasar sesuai UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.